

MODEL LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Alfia Miftakhul Jannah¹, Asih Setiyowati², Khusna Haibati Lathif³,
Nina Deliana Devi⁴, Fandi Akhmad⁵
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
alfia1800031118@webmail.uad.ac.id

Abstract

The government's high attention to the implementation of education in Indonesia is evidenced by the enactment of Law No. 20 of 2003 concerning the National Education system, namely equal distribution of education without discrimination against Children with Special Needs (ABK). However, the implementation of inclusive education in Indonesia has not run perfectly as the purpose of implementing inclusive education. Some schools appointed as implementing inclusive schools only run perfunctory. Although there are many inclusive schools in Indonesia, the quality of inclusive schools in Indonesia is still lacking. This study aims to analyze the inclusive education service model and its implementation in Indonesia, and the quality of inclusive schools in Indonesia. The research was conducted using a paper research method, namely reviewing and understanding studies related to the title. The results of this study showed that the model of education services and the implementation of inclusive education in Indonesia is still of low quality, this is because schools do not yet have readiness in implementing inclusive education.

Keywords: *Implementation of Inclusive Education in Indonesia; Inclusive Education; The Child With Special Needed*

Abstrak : Tingginya perhatian pemerintah terhadap Pelaksanaan pendidikan di Indonesia dibuktikan dengan adanya penetapan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yakni pemerataan pendidikan tanpa adanya diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Meskipun demikian implementasi pendidikan inklusi di Indonesia belum berjalan sempurna seperti tujuan pelaksanaan pendidikan inklusi. Beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana sekolah inklusi hanya berjalan ala kadarnya. Meskipun secara kuantitas sekolah inklusi di Indonesia sudah banyak namun secara kualitas sekolah inklusi di Indonesia masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model layanan pendidikan inklusi dan implementasinya di Indonesia, dan kualitas sekolah inklusi di Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian review papers yakni peneliti mengkaji dan memahami kajian-kajian yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa model layanan pendidikan dan implementasi pendidikan inklusi di Indonesia masih kurang secara kualitas, hal ini disebabkan karena sekolah belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi.

Kata Kunci: Implementasi Pendidikan Inklusi di Indonesia; Pendidikan Inklusi; Anak Berkebutuhan Khusus

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan tanpa adanya diskriminasi pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ialah mengarahkan sekolah reguler sebagai sekolah inklusi menjadi bentuk pemerataan pendidikan bagi ABK. Sekolah Luar Biasa (SLB) biasanya hanya ada di kota. Hal tersebut mengakibatkan ABK yang tinggal jauh dari kota kesulitan mengenyam pendidikan, maka ditetapkanlah sekolah inklusi. Selain itu sistem pendidikan SLB justru menghasilkan eksklusifisme pada kalangan masyarakat, yakni sebagai penghalang hubungan antara ABK dengan anak-anak normal. Akibatnya ABK menjadi anak yang terasingkan dan tidak menyatu dengan kehidupan masyarakatnya.

Apabila realita tersebut diteruskan dan tidak ada upaya perubahan maka ABK akan selalu dikucilkan, dianggap tidak ada, dan dianggap tidak penting sehingga membuat ABK merasa kurang percaya diri dan semakin introvert. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan sekolah inklusi menjadi solusi untuk merespon realitas tersebut. Melalui penetapan sekolah inklusi diharapkan akan menghilangkan eksklusifisme dimasyarakat. Sekolah inklusi merupakan sekolah umum dimana Peserta Didik Reguler (PDR) dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) belajar dalam satu kelas yang sama. Sedangkan sekolah luar biasa ialah sekolah yang bertujuan untuk membuatkan PDBK baik tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autisme dan kekhususan lainnya supaya menjadi pribadi yang berdikari sinkron terhadap potensi yang dimilikinya.

Aturan nasional sebagai dasar pelaksanaan pendidikan inklusi ialah Pasal 31 UUD 1945 tentang hak menerima pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. UU No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, UU No.23 tahun 2002 ihwal Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2020 perihal akomodasi yang pantas bagi Peserta Didik penyandang Disabilitas. PP No.13 Tahun 2020 pasal 5 menyebutkan bahwa pemberian akomodasi merupakan salah satu dari bentuk penyiapan pendidikan serta tenaga kependidikan. Ketentuan Pemerintah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di pasal 6 Permendikbud No.70 Tahun 2009 mengungkapkan bahwa pendidikan inklusi harus dilaksanakan oleh setiap wilayah di Indonesia. Bunyi pasal tersebut yaitu: 1) pemerintah kabupaten atau kota

mengklaim terselenggaranya pendidikan inklusif dengan kebutuhan peserta didik, 2) Pemerintah kabupaten atau kota mengklaim tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pendidikan inklusif pada pendidikan inklusif, 3) pemerintah kota dan pemerintah provinsi memberi bantuan kelangsungan sumber daya pendidikan.¹

Tiga cara yang dilakukan pemerintah dalam mempersiapkan pendidik di sekolah-sekolah inklusi, yaitu: 1) program pendidikan berisikan tentang mata kuliah yang membahas mengenai pendidikan inklusif, 2) penyediaan pengajar pendidikan khusus pada forum penyelenggara di sekolah inklusi, 3) penyelenggaraan *training* bagi pendidik serta tenaga pendidik. Upaya tersebut diatas sudah dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah, namun realitanya pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia masih belum maksimal.

Pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia masih belum sinkron dengan tujuan dan panduan penyelenggaraan sekolah inklusi, baik sarana dan prasarana, kualifikasi pengajar, siswa, serta dukungan orang tua dan masyarakat.² Pendidikan inklusi memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraannya pada tahun-tahun berikutnya agar anak yang menyandang berkebutuhan khusus tetap menerima pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya swera sepenuhnya menghargai realitas keragaman pada kehidupan sosial.³

Oleh karena itu muncullah dua rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana model layanan pendidikan inklusif dan implementasinya di Indonesia?. Dan *kedua*, hambatan-hambatan pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia sehingga sekolah inklusi masih kurang secara kualitas?

Penelitian ini sangat penting, karena kualitas sekolah inklusif merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan sekolah inklusif. Kualitas sekolah inklusif dapat dinilai dari sarana prasarana, habits dan budaya di sekolah, serta ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebagai pilar yang memperkuat dan memperkokoh

¹ Fernandes, Adaptasi Sekolah terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi, dalam *Jurnal of Sociology Research and Education*, 2017

² A. Wibowo, Problematika Pendidikan Inklusi di Indonesia, dalam *Jurnal Publikasi Ilmiah UMS*, 2019

³ Ru'iyah, Akhmad, dll, Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Inklusi di Yogyakarta, dalam *Jurnal Al-Mannar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 2021

penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain itu, sekolah inklusi telah berjalan beberapa tahun akibatnya perlu adanya penelitian ihwal model pelayanan pendidikan inklusi di Indonesia serta bagaimana kualitas sekolah inklusi di Indonesia.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Endro Wahyun dkk, dalam penelitiannya terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat Sekolah Dasar di daerah Jawa Timur menyebutkan bahwa penerimaan ABK pada sekolah inklusif di Jawa Timur disesuaikan dengan kesanggupan sekolah itu sendiri dalam menerima dan mengatasi ABK. Dari sepuluh sekolah inklusif yang diteliti, SDN Klampis I terbanyak menerima peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus yaitu sebanyak 154 siswa, sedangkan sekolah inklusif lain hanya menerima 54 siswa.⁴

Hasil penelitian oleh Afrina Devi Marti pada paper penelitian tersebut dilakukan di Kota Padang, hasil penelitian menyebutkan terkait sekolah yang diberi amanah menjadi penyelenggara pendidikan inklusif tetap menjalankan pendidikan inklusif meskipun belum dapat melaksanakan pendidikan inklusi secara sungguh-sungguh karena alasan yang mendasar yaitu terkait kekurangan sarana, prasarana dan sumber daya manusia,

Hasil kajian Indah & Binahayati dalam prosiding KS menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengupayakan banyak program kerja dan aktivitas yang di laksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas-dinas pendidikan di provinsi, Kota/Kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan tantangan. Kekurangan yang sering terjadi adalah kesalahpahaman mengenai konsep pendidikan inklusi, peraturan dan pedoman yang tidak istiqomah, dan sistem pendidikan yang tidak fleksibel. Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia tidak memperhatikan konsep penyelenggaraan, dimulai dari segi peserta didik, guru, kelengkapan sarpras, morivasi dari kedua orang tua dan sampai kepada masyarakat.⁵

Dari berbagai hasil penelitian yang telah diungkapkan, dapat dipahami mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih terjadi banyak problematika, mulai dari kesanggupan dari sekolah, peraturan dan kebijakan, sistem

⁴ Wahyuno dkk, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar*, 2014

⁵ Darma dkk, *Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia*,

pendidikan, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, tradisi atau *cultur* di sekolah bahkan dukungan dari orang tua dan masyarakat. Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan inklusif sangat bermanfaat baik bagi PDBK maupun PDR. Bagi PDBK mereka dapat belajar dan berinteraksi langsung dengan teman sebaya sehingga mereka dapat berkembang secara sosial dan emosi. Sedangkan manfaat bagi PDR yakni sebagai wadah untuk mengajarkan pada peserta didik agar dapat menghargai dan mengapresiasi orang lain, menghargai perbedaan dan menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat luas, lebih bersyukur, lebih peduli dan mengembangkan perasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan proses tinjauan pustaka dan dibarengi oleh metode analisis pustaka. Pengumpulan data dilaksanakan lewat literatur ilmiah secara terstruktur melalui artikel, jurnal serta dokumen yang membahas terkait dengan tema penelitian ini secara signifikan. Konteks yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai pendidikan inklusif. Selanjutnya dilakukan proses pengumpulan data serta analisis, kemudian penelitian menyampaikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Layanan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusi menjadi salah satu lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan maksud memberikan ruang peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki keistimewaan bakat serta kecerdasan untuk memperoleh pendidikan atau pembelajaran selayaknya peserta didik reguler dengan tidak memandang perbedaan.⁶ Adanya pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler akan melahirkan korelasi interaktif saling untuk saling memahami satu dengan yang lain, belajar mengerti, belajar menerima, menerima *different* dengan maksud

⁶ Nuraini, Model Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, *Jurnal Edukatif*, 2019

untuk meningkatkan sikap bersimpati, berempati dan saling bertoleransi serta belajar bekerjasama di antara semua peserta didik. ⁷Dalam pendidikan inklusif terdapat beragam peserta didik yang meliputi latar belakang, kemampuan, serta kapasitas, sehingga dalam penyelenggaraannya memerlukan upaya yang serius sehingga mampu menghadirkan lingkungan yang ramah bagi pembelajar, dimana seluruh peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. (Kadir, 2015)

Penempatan peserta didik berkebutuhan khusus perlu memperhatikan potensi, jenis, serta tingkat kelainan atau kebutuhan. Penempatan tersebut hanya bersifat sementara, peserta didik berkebutuhan khusus akan berpindah dari satu alternatif layanan ke alternatif lain dengan dugaan kebutuhan khususnya berubah. Filosofi pendidikan inklusif menyediakan berbagai alternatif sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik.

Peserta didik dalam pendidikan inklusif dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu peserta didik berkebutuhan khusus penerima pendidikan khusus tanpa disertai hambatan kognitif dan intelektual serta yang disertai hambatan kognitif dan intelektual. Setiap kategori peserta didik berkebutuhan khusus akan memperoleh pelayanan yang disesuaikan dengan salah satu dari model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Model-model pembelajaran pendidikan inklusif yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, baik peserta didik normal maupun berkebutuhan khusus meliputi:

- a. Model kelas reguler (inklusif penuh), model pembelajaran yang menggabungkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dengan Peserta Didik Reguler (PDR) dengan catatan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) tidak mengalami gangguan intelektual yang signifikan. Dalam kelas ini tidak terdapat perlakuan atau pelayanan khusus, semua peserta didik diperlakukan sama. ⁸
- b. Model *Cluster*, Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dikelompokkan tersendiri akan tetapi tetap belajar secara bersama-sama

⁷ Kadir, Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2015

⁸ ICODIF, *Promoting Disability Rights in Indonesia*, (Yogyakarta: PLD Press, 2020)

dengan Peserta Didik Reguler (PDR) dalam satu kelas. Dalam kelas ini Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) didampingi oleh pendamping supaya peserta didik tersebut dapat memperoleh pembelajaran selayaknya Peserta Didik Reguler. Peran pendamping dalam model ini memberikan pelayanan khusus ketika Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) mengalami kesulitan dan hambatan dalam belajarnya.⁹

c. Model *Pull Out*, model pembelajaran ini menempatkan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di ruang tersendiri untuk memperoleh materi pelajaran tertentu dengan pendampingan khusus oleh guru khusus. Terdapat komponen-komponen tertentu dalam materi pelajaran yang memerlukan penyampaian secara khusus kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang disebabkan terjadinya ketimpangan apabila harus belajar bersama dengan peserta didik lainnya. Terdapat waktu khusus dimana Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dipindahkan dari kelas reguler untuk memperoleh pelayanan khusus dengan materi, strategi, metode serta media yang lebih sesuai dengan kebutuhan.¹⁰

d. Model *Cluster and Pull Out*, model pembelajaran gabungan antara model *cluster* dan model *pull out*. Sistem model pembelajaran ini pada waktu-waktu tertentu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dikelompokkan tersendiri tetapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus. Kemudian di waktu-waktu lain Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) ditempatkan di kelas atau ruangan khusus untuk diberikan layanan khusus dengan materi, strategi, metode serta media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. (Minasih, 2019)

e. Model kelas khusus, model yang digunakan oleh sekolah yang mengadakan kelas khusus kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), akan tetapi terdapat aktivitas yang lain didalam pembelajaran tertentu semua peserta didik digabungkan dengan kelas reguler. Model ini merupakan model pembelajaran yang hanya menyediakan kelas bagi Peserta Didik

⁹ Sholihin, *Kanwil Kemenag Kalbar*, diakses pada <http://kalbar.kemenag.go.id>, 2019

¹⁰ Fitrianah, Meningkatkan Minat Belajar Anak Inklusif melalui Model Pull Out di MI Nurul Huda Kalangananyar Sedati, dalam *Jurnal UMSIDA*, 2018

Berkebutuhan Khusus (PDBK) secara penuh tanpa adanya peserta didik normal sekalipun dalam satu kelas. Akan tetapi di waktu tertentu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) digabungkan dengan Peserta Didik Reguler (PDR). Model kelas khusus ini memiliki keunikan tersendiri dimana kelas-kelas untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) berada di dalam komplek yang sama dengan kelas reguler. model kelas khusus ini Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dapat berinteraksi dengan Peserta Didik Reguler (PDR) secara tidak langsung di dalam kelas dan berinteraksi secara langsung di luar kelas.

f. Model Khusus Penuh, model yang digunakan sekolah yang mengadakan kelas khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Pembelajaran pada model ini Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) belajar berbarengan dengan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) lainnya secara *full* dan tidak bercampur dengan Peserta Didik Reguler (PDR), meskipun dilaksanakan di sekolah reguler.¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan inklusif seperti halnya pada model-model yang telah dijelaskan sebelumnya tidak mewajibkan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berada di kelas reguler setiap saat dengan seluruh mata pelajarannya (inklusi penuh). Hal tersebut disebabkan sebagian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat berada di kelas atau ruangan khusus dengan pendamping khusus sesuai dengan jenis kebutuhan mereka.¹²

B. Implementasi Pendidikan Inklusi di Indonesia

Implementasi pendidikan inklusi di setiap negara sangat bervariasi hal ini disebabkan karena adanya budaya dan tradisi yang berbeda. Perbedaan yang ada juga terletak pada pelaksanaan yang terjadi di tingkat provinsi, kota dan meluas hingga ke ranah sekolah (Darma & Rusyidi). Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi pada beberapa faktor yaitu: faktor budaya, politik, dan sumber daya manusia. Hingga kini sekolah inklusi masih

¹¹ A. Kadir, Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2015

¹² K. Wathoni, *Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam Ta'llum*, 2013

menjalankan perbaikan di beberapa bidang. Pelaksanaan sekolah inklusi tidak sesederhana pelaksanaan sekolah umum, karena pelaksanaan sekolah inklusi membutuhkan fleksibilitas kurikulum, tenaga pendidik yang profesional biasa disebut guru pembimbing khusus, lingkungan dan penyelenggara sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran inklusi di dalam sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup serta memadai, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas para siswanya (Lisinus & Sembiring, 2020). Selain itu bisa ditelusuri lebih dalam mulai dari awal penerimaan siswa di sekolah inklusi tidak jauh berbeda dengan penerimaan siswa regular lainnya, namun di sekolah inklusi lebih menekankan kepada kemampuan anak dalam hal kognitif, emosi, sosial dan perilaku. (Masitah, 2016)

Berdasarkan filosofi dan pentingnya pendidikan inklusif, Ford, A., R. Schnorr, L. Meyer, L. Davern, J. Black, and P. Dempsey (1989). Ia menekankan bahwa pendidikan inklusif memiliki beberapa prinsip, di antaranya:

1. Mengajar semua anak yang berkebutuhan khusus di kelas regular tanpa memandang jenis kelamin
2. Memberi semua siswa kesempatan terbesar untuk senantiasa belajar di setiap kontribusi
3. Menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh sekolah umum
4. Memberikan dukungan kepada guru dan manajer regular (menyediakan waktu, latihan, sumber daya, strategi)
5. Jadwal disamaratakan baik untuk siswa berkebutuhan khusus dan yang lain
6. Mengikutsertakan siswa yang berkebutuhan khusus untuk kelas-kelas akademik dan kegiatan setelah sekolah dengan anak-anak seusianya, seperti seni, musik, senam, studi lapangan, dan pelatihan kelulusan
7. Siswa-siswa berkebutuhan khusus menggunakan kanten, *library*, lapangan, dan sarana serta prasarana lainnya bersama-sama
8. Persahabatan diantara keduanya selalu didorong untuk senantiasa dilakukan

9. Lingkungan masyarakat harus menerima siswa yang berkebutuhan khusus jika perlu
10. Semua anak harus diajarkan terkait dengan aturan menerima dan memahami perbedaan di setiap manusia
11. Menempatkan anak yang tidak memerlukan pendidikan khusus di sekolah yang sama dengan anak yang memerlukan pendidikan khusus
12. Orang tua harus serius dalam memberikan rasa kepedulian
13. Menyediakan program pendidikan yang rata

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka munculah implikasi, yaitu:

1. Peserta didik

Pendidikan inklusif sangat diharapkan bisa mem-*backup* semua anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum, terlepas dari kondisi atau batasan, baik yang berkaitan dengan disabilitas (kekhususan), *gender*, asal daerah, dll¹³. Terpenting lagi, anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus awalnya tidak memiliki hambatan besar untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum.

2. Kurikulum atau program pendidikan

Kurikulum atau program pendidikan untuk semua peserta didik, dan anak berkebutuhan khusus, bersifat fleksibel pada tataran pelaksanaannya sehingga dapat diterapkan kepada semua orang yang menyandang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu *Individualized Educational Programs (IEP)* bisa dikatakan sebagai pendekatan yang memiliki hubungan dan efektivitas yang tinggi.¹⁴ Layanan bimbingan dan konseling yang mumpuni akan menjadikan tujuan institusional bergerak secara komprehensif, sehingga hal tersebut akan membuat para peserta didik memiliki unggulan dalam hal karir, sosial serta yang paling terpenting adalah individunya.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

¹³ Y. Subasno, Pendidikan Inklusif untuk Mengakomodasi Peserta Didik dalam Rangka Pengembangan Indonesia, dalam *Jurnal Institutional Repository UPH*, 2018

¹⁴ Budiono dan Muslim, *Individualized Education Program*, (Jember: CV Pustaka Abadi, 2020)

Pendidik dan guru pendidikan sangat menjadi hal yang penting dalam mencapai kesuksesan pada penyelenggaraan di dalam suatu lembaga. Umumnya guru yang paling populer adalah mereka yang memiliki keterampilan profesional untuk memahami perbedaan individu, mengembangkan materi yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan kegiatan pendidikan dalam kemampuan mereka dalam menggunakan metode.

4. Sarana-Prasarana

Keberadaan dan pengadaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat krusial, terutama bagi anak berkebutuhan khusus.¹⁵ Sarana dan prasarana yang produktif memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang menarik serta menyenangkan (Rahmayani, 2020).

5. Evaluasi

Evaluasi termasuk kedalam aspek terpenting dari suatu kegiatan belajar dan mengajar (Sofyan, 2021). Evaluasi dalam pendidikan inklusif diharapkan dapat memberi sumbangan berupa kontribusi yang bermakna, dengan memberikan *encourage* siswanya untuk *visioner*, dan bukan menjadi *boomerang* dalam melakukan evaluasi yang tentunya memadamkan semangat untuk belajar (Widyanti, 2017). Evaluasi tersebut diharapkan menjadi evaluasi yang bersifat evaluatif bukan *judgmental*.

6. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya mendapatkan kedudukan yang bisa dijangkau untuk mengelola lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan minimal standar dalam pelayanan. Pada aspek kegunaan pendidikan inklusif, pengawasan berkelanjutan diperlukan sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan inklusif. Hal tersebut dimaksudkan untuk diberikan pada pengawasan

¹⁵ Sukadari, *Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Kanwa Publishier, 2019)

kinerja daripada pengawasan administratif. ¹⁶Oleh karena itu pengawas membutuhkan wawasan tentang keragaman siswa berkebutuhan khusus.

7. Partisipasi masyarakat.

Untuk menjamin keberlanjutan implementasi pendidikan inklusif, diperlukan berbagai keikutsertaan dari beberapa aspek terutama orangtua, organisasi profesi, serta masyarakat, oleh karena itu beban penyelenggaraan pendidikan inklusif bisa dilirik secara mudah.

¹⁷Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal jika tidak ada partisipasi dari masyarakat.

C. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Sekolah Inklusif di Indonesia

Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di kelas yang sama dengan Peserta Didik Reguler (PDR) cenderung lebih banya mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Hambatan itu disebabkan oleh banyak sebab yaitu: PDBK merupakan peserta didik minoritas di kelas, kurikulum yang telah dibentuk kaku serta tidak responsif kepada kebutuhan yang diperlukan oleh PDBK, pedoman yang kurang mendukung, minimnya anggaran, dukungan SDM, ada pandangan masyarakat terhadap pendidikan inklusi (Nafisah & Rohaya, 2021).

Yulianto dalam paper Syifaun Nafisah & Sti Rohaya mengulas dan mengembangkan kembali pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan nasional, karena implementasi pendidikan inklusi yang sebenarnya masih cenderung gagal terlaksana dengan baik dalam memenuhi kebutuhan anak-anak ABK serta kualitas pendidikan itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pendidikan inklusif dan sekolah inklusif ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) lingkungan, yaitu penerimaan PDBK, penguasaan guru dalam mengajar mata pelajaran serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, 2) faktor internal PDBK (motivasi, rasa ingin tahu, komunikasi dan interaksi),

¹⁶ T, Pristiwaluyo, *ABK Centre*, diakses pada <http://abkcentre.blogspot.com>, 2009

¹⁷ L. Kholida, Manajemen Pendidikan Inklusi, dalam *Jurnal TARBAWI*, 2016

3) hakikat dan tingkat kebutuhan khusus (menempatkan asesmen sebagai tahapan penting).

Berdasarkan realitas di atas, diperlukan rekomendasi berikut ini untuk meningkatkan implementasi kebijakan pendidikan inklusif diantaranya yaitu:

- a. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus perlu dilayani dengan setulus hati oleh para *stakeholder*
- b. Guru Pendamping Khusus (GPK) harus terus ditambah untuk memudahkan guru utama
- c. Program pendampingan yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi harus diprioritaskan
- d. Sekolah SLB dan lainnya harus mendapatkan sosialisasi
- e. Komunikasi diperlukan antara guru dan orang tua untuk meningkatkan keterampilan
- f. Semua sekolah negeri harus menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK)
- g. Semua guru di sekolah umum harus senantiasa bersiap didalam menerima PDBK dalam kondisi apapun
- h. Pengembangan *capacity building* bagi guru untuk meningkatkan keterampilan perlu diupayakan oleh pemerintah
- i. Perlu adanya keseriusan bersama diantara sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah
- j. Untuk mengetahui problematika yang sedang hangat dibicarakan, dinas pendidikan harus menyediakan ruang khusus sehingga pembahasannya akan lebih intens dan spesifik
- k. Pelatihan secara berkelanjutan bagi Guru Pendamping Khusus (GPK) wajib dilakukan
- l. Kebijakan yang cenderung kaku tidak perlu digunakan untuk pengembangan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif
- m. Perlu adanya sebuah paguyupan sebagai wadah pengaduan dan advokasi sekaligus memonitoring implementasi dari peraturan yang ada.¹⁸

¹⁸ Hanjarwati dan Aminah, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi, dalam *Jurnal INKLUSI*, 2014

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan untuk menyamaratakan hak semua peserta didik baik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) maupun Peserta Didik Reguler (PDR). Pendidikan inklusif memberikan wadah bagi PDBK untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan PDR. Melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif diharapkan mampu menanamkan sikap saling menghormati, menyanyangi dan yang terpenting yaitu sikap saling menghargai pada diri peserta didik. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan model pendidikan atau pembelajaran yang akan diterapkan pada sekolah inklusi. Model-model pendidikan inklusif disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kesesuaian model pendidikan atau pembelajaran yang dipilih akan berdampak pada kenyamanan dalam proses pembelajaran baik untuk PDBK maupun PDR.

Sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara sekolah inklusif tetap melaksanakan pendidikan inklusif walaupun secara kualitas pelaksanaan sekolah inklusif belum terlalu baik. Pelaksanaan sekolah inklusif yang ala kadarnya itu disebabkan karena adanya beberapa hambatan diantaranya yaitu: kesiapan sekolah, peraturan dan kebijakan, sistem pendidikan, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, tradisi atau *cultur* di sekolah bahkan dukungan dari orang tua dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, A. N., & Muslim, I. B. (2020). *Individualized Education Program (IEP)*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (n.d.). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Riset & PKM*, pp. 147-300.
- Fernandes, R. (2017). Adaptasi Sekolah terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif. *Jurnal of Sociology Research and Education*, 119-125.

- Fitrianah. (2018). Meningkatkan Minat Belajar Anak Inklusi melalui Midel Pull Out di MI Nurul Huda Kalangananyar Sedati. *umsida*.
- Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi. *INKLUSI*, 221-248.
- ICODIF. (2020). Promoting Disability Rights in Indonesia. Yogyakarta: PLD Press.
- Kadir, A. (2015). Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 13.
- Kholida, L. (2016). Manajemen Pendidikan Inklusi: Social Disability Model. *TARBAWI*.
- Lisinus, R., & Sembiring, P. (2020). *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus (Sebuah Perspektif Bimbingan dan Konseling)*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Masitah, W. (2016). Pendidikan Inklusif Anak Usia Dini. *Jurnal Publikasi Ilmiah UMS*.
- Minasih. (2019). *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nafisah, S., & Rohaya, S. (2021). Sistem Monitoring Akademik Mahasiswa Difabel dengan Box Testing. *Inklusi*, 43-62.
- Nuraini. (2019). Model Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Edukatif*, 5(2), 102.
- Pristiwaluyo, T. (2009, November). *ABK Centre*. Retrieved from <http://abkcenter.blogspot.com>
- Rahmayani. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Fityan School Kubu Raya. *Jurnal UNTAN*.
- Ru'ya, S., Akhmad, F., Putwiyani, D., & Sulistiawan, A. (2021). Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Inklusi di Yogyakarta. *Al-Manar : Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 70-90.
- Sholihin. (2019, February 7). *Kanwil Kemenag Kalbar*. Retrieved November 2, 2021, from <http://kalbar.kemenag.go.id>
- Sofyan, N. (2021, February). Peranan Evaluasi Pendidikan.
- Subasno, Y. (2018). Pendidikan Inklusif untuk Mengakomodasi Peserta Didik dalam Rangka Pengembangan Indonesia. *Institutional Repository UPH Surabaya*.
- Sukadari. (2019). *Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Wahyuno, E., Ruminiati, & Sutrisno. (2014). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar. *Sekolah Dasar*, 77-84.
- Wathoni, K. (2013). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam. *Ta'allum*, 1(1), 107.

- Wibowo, A. (2019). Problematika Pendidikan Inklusi di Indonesia. *Publikasi Ilmiah UMS*.
- Widyanti, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Wijaya, D. (2019). *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*. Jakarta: KENCANA.